

ANALISIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG – UNDANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)

INTISARI

Oleh

Ovi Hanifah¹

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.²

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi di dalam Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berdasarkan asas *lex specialis* serta harmonisasi pengaturannya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Analisis penelitian ini secara induktif, kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan rekodifikasi secara terbatas Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak mempengaruhi *lex specialis* tindak pidana korupsi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 187 RUU KUHP Agustus 2019. RUU KUHP hanya mengadopsi *core crime* tindak pidana korupsi yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yang disesuaikan dengan pola pemidanaan yang baru. Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di masa yang akan datang selain bertindak sebagai *lex generalis* juga bertindak sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana agar tercapai konsolidasi hukum dalam membangun sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Asas *Lex Specialis*, RUU KUHP.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) Pada Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ANALYSIS OF THE APPLICATION LEX SPECIALIS PRINCIPLE TOWARDS CRIME OF CORRUPTION IN THE DRAFT REVISION OF THE CRIMINAL CODE (RUU KUHP)

By

Ovi Hanifah³

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.⁴

Research in this legal writing has purposes to obtain knowledge and to analyze crime of corruption regulation in the draft revision of the criminal code based lex specialis principle and harmony of the regulation in Indonesia penal reform.

This research is classified as normative legal research and supported by primary and secondary data. This research uses qualitative methods by combining and analyzing descriptively the results of the research obtained through literature research and field research through interviews.

The result shows that the limited recodification penal policy of the draft revision of the criminal code in Indonesia penal reform not impacting lex specialis of the crime of corruption based by Article 187 the draft revision of the criminal code. The draft revision of the criminal code is only adopt core crime of the crime of corruption regulation which is Article 2, Article 3, Article 5, Article 11 and Article 13 Indonesia Corruption Law and adjusted to the new pattern of criminal justice. In the future the draft revision of criminal code in addition act as lex generalis also as bridging articles for law outside criminal code in order law consolidation to build national criminal law system.

Keywords: *Crime of Corruption, Lex Specialis Principle, The Draft Revision of The Criminal Code.*

³Undergraduate Law Student, Degree Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Law Faculty of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.